

BAB II

GAMBARAN UMUM BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

I.1 Sejarah Singkat Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang

Penulis mendeskripsikan sejarah singkat Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang ini dari Buku Berjudul Selayang Pandang Kota Semarang (Dinas Informasi dan Komunikasi Pemerintah Setda Kota Semarang, 2007). Pada tahun 1906 dengan Staatblat Nomor 120 tahun 1906 dibentuk Pemerintah Gemeente. Pemerintah kota besar ini dikepalai oleh seorang *Burgemeester* (Walikota). Sistem Pemerintahan ini dipegang oleh orang-orang Belanda dan berakhir pada tahun 1942. Berkenaan datangnya Pemerintahan pendudukan Jepang terbentuklah Pemerintah Daerah Semarang yang di kepalai Militer (*Shico*) dari Jepang, dengan 2 (dua) orang wakil (*Fuku Shico*) yang masing-masing dari Jepang dan seorang dari Indonesia.

Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintahan Kota Semarang belum dapat menjalankan tugasnya karena pendudukan Belanda. Tahun 1946 Inggris atas nama sekutu menyerahkan Kota Semarang kepada pihak Belanda. Ini terjadi pada tanggal 16 Mei 1946. Tanggal 3 Juni 1946 dengan tipu muslihatnya, pihak Belanda menangkap Mr. Iman Sudjahri, Walikota Semarang sebelum proklamasi kemerdekaan. Tidak lama sesudah kemerdekaan yaitu 15 sampai 20 Oktober terjadilah peristiwa yang disebut Pertempuran Lima Hari Semarang. Selama masa pendudukan Belanda tidak ada pemerintahan daerah Kota Semarang. Namun, para pejuang di bidang pemerintahan tetap menjalankan

pemerintahan di daerah pedalaman atau daerah pengungsian di luar kota sampai dengan bulan Desember 1948. Daerah pengungsian berpindah-pindah mulai dari kota Purwodadi, Gubug, Kedungjati, Salatiga, dan akhirnya di Yogyakarta.

Pimpinan pemerintahan berturut-turut dipegang oleh R Patah, R, Prawotosubidyo dan Mr Ichsan. Pemerintahan pendudukan Belanda yang dikenal dengan *Recomba* berusaha membentuk kembali Pemerintahan Gemeente seperti di masa kolonial dulu di bawah pimpinan R Slamet Tirtosubroto. Pada tanggal 1 April 1950 Mayor Suhardi, menyerahkan kepemimpinan daerah Semarang kepada Mr Koesoedibyono, seorang pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta, beliau menyusun kembali aparat pemerintahan guna memperlancar jalannya pemerintahan.

Sejak kedaulatan mencapai kejayaanya Kota Semarang telah diakui sebagai pemerintahan yang berbentuk kotamadya, dan ternyata fungsi ini semakin lama tampak nyata bahkan diikuti dengan perkembangan fungsi-fungsi lain yaitu perhubungan, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Untuk menunjang perkembangan kegiatan tersebut maka sejak tanggal 19 Juni 1976 Kota Semarang telah diperluas sampai wilayah Mijen, Gunungpati, Genuk dan Tugu jumlah kecamatan di Kota Semarang yaitu kecamatan dan 177 kelurahan.

Sejak tahun 1945 para Walikota yang memimpin kota besar Semarang yang kemudian menjadi Kota Praja dan akhirnya menjadi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel. II.1
Daftar Nama Walikota Semarang

No	Nama	Tahun
1	Mr. Moch. Ichsan	1945 - 1949
2	Mr. Koesoedibiyono Tjondrowibowo	1949 – 1951
3	RM. Hadisoebeno Sosrowardoyo	1951 - 1958
4	Mr. Abdulmadjid Djojoadingrat	1958 – 1960
5	RM Soebagyono Tjondrokoesoemo	1961 – 1964
6	Mr. Wuryanto	1964 – 1966
7	Letkol. Soeparno	1966 – 1967
8	Letkol. R. Warsito Soegiarto	1967 – 1973
9	Kolonel Hadijanto	1973 – 1980
10	Kol. H. Iman Soeparto Tjakrajoeda SH	1980 – 1990
11	Kol. H. Soetrisno Suharto	1990 – 2000
12	H. Sukawi Sutarip SH.	2000 – 2010
13	Drs. H. Soemarmo HS, MSi.	2010 – 2013
14	Hendrar Prihadi, SE, MM.	2013-2015; 2016- sekarang
15	Tavip Supriyanto	Pejabat Sementara, 2015- 2016

Sumber: Arsip Bagian Kesra Setda Kota Semarang, 2019

Pemerintah Kota Semarang dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota, dengan Kantor Pemerintahan terletak di jalan Pemuda No 148 Semarang (Kompleks Balaikota dan Gedung Moch. Ichsan) dan jalan Pemuda No 175 Semarang (Gedung Pandanaran). Sejak 1, 2, 3, dan 4 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Kota Semarang, yang terdiri dari :

1. Walikota dan Wakil Walikota
2. Sekretaris Daerah dibantu 3 Asisten :
 - a. Asisten I Bidang Tata Praja
 - b. Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Asisten III Bidang Administrasi
3. dan Tujuh Belas Dinas Daerah yang ada di Kota Semarang.

I.2 Visi dan Misi

I.2.1 Visi

Visi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera.

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan.

Visi pertama, menjadikan Semarang HEBAT, mengandung arti masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa. Semarang yang Hebat dapat terlihat antara lain melalui kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa-jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, serta luas genangan banjir dan rob yang semakin menurun.

Visi kedua, menjadikan Semarang SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

I.2.2 Misi

Mewujudkan Visi Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan. Pelayanan Publik Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan. Lingkungan Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

I.3 Tugas dan Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat di Pemerintahan Kota Semarang

Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian dari Pemerintah Kota Semarang. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang, ideal dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua elemen masyarakat untuk membangun suatu peradaban kehidupan yang layak

dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan umum tidak hanya kesejahteraan lahir tetapi juga kesejahteraan batin. Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki 3 (tiga) Bagian, yang terdiri dari

1. Sub Bagian Pelayanan Sosial
2. Sub Bagian Kesehatan Keluarga; dan
3. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menjalankan visi dan misi Walikota Semarang.

I.3.1 Tugas dan Fungsi

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan masyarakat, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan (dikutip dari Peraturan Walikota Semarang Tahun 2008 Nomor 21 Pasal 43).

A. Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah dibidang Pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
5. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan sosial, bidang kesehatan keluarga, bidang agama, bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
7. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat;
8. Penyusunan laporan kinerja program Bagian Kesejahteraan Rakyat;
dan,

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Tugas Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
4. Menyiapkan bahan fasilitasi terhadap usaha pengembangan sarana prasarana tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga-lembaga keagamaan;
5. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan;
6. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji dan kegiatan keagamaan lainnya;
8. Menyiapkan bahan pelayanan administratif dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan;

9. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
10. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
11. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan;
12. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

I.4 Statistik Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang

I.4.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini jumlah pegawai di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat dalam Tabel II.2 :

Tabel II.2
Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang
1.	Laki-Laki	11 Orang
2.	Perempuan	8 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Arsip Bagian Kesra Setda Kota Semarang, 2019

Berdasarkan pada Tabel II.2, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang berdasarkan jenis

kelamin lebih dominan pegawai laki-laki dengan 11 orang, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan ialah 8 (delapan) orang.

I.4.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Berikut ini jumlah pegawai di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam Tabel II.3 :

Tabel II.3
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Jenis Pendidikan	Jumlah Orang
1.	SD	-
2.	SMP	-
3.	SMA	4 Orang
4.	D1	-
5.	D2	-
6.	D3	-
7.	D IV/ S1	13 Orang
8.	S2	2 Orang
9	S3	-
Jumlah		19 Orang

Sumber: Arsip Bagian Kesra Setda Kota Semarang, 2019

Pada Tabel II.3 menunjukkan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan terbanyak adalah Srata 1 (S1) dengan jumlah pegawai 13 orang, sedangkan yang paling sedikit yaitu Srata 2 (S2) sejumlah 2 (dua) orang.

I.4.3 Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

Berikut ini jumlah pegawai di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang berdasarkan golongan, dapat dilihat dalam Tabel II.4 :

Tabel II.4
Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No	Jenis Golongan	Jumlah Orang
1.	Non ASN	3 Orang
2.	Golongan I	0 Orang
3.	Golongan II	4 Orang
4.	Golongan III	10 Orang
5.	Golongan IV	2 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Arsip Bagian Kesra Setda Kota Semarang, 2019

Berdasarkan Tabel II.4, pegawai di Bagian Kesra terdiri dari beberapa golongan yaitu yang paling banyak pegawai dengan status Golongan III, sedangkan yang paling sedikit pada Golongan IV.

I.4.4 Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan

Berikut ini jumlah pegawai di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang berdasarkan jabatan dapat dilihat dalam Tabel II.5 :

Tabel II.5
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah Orang
1.	Struktural	3 Orang
2.	Fungsional Umum	12 Orang
3.	Fungsional Tertentu	4 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Arsip Bagian Kesra Setda Kota Semarang, 2019

Berdasarkan Tabel II.5, pegawai dengan status jabatan Fungsional Umum ialah pegawai dengan status jabatan paling banyak, sedangkan untuk yang paling sedikit menunjukkan pada jabatan Struktural.

I.4.5 Jumlah pegawai berdasarkan Usia

Berikut ini jumlah pegawai di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang berdasarkan usia dapat dilihat dalam Tabel II.6 :

Tabel II.6
Jumlah pegawai berdasarkan usia

No	Jenis Usia	Jumlah Orang
1.	Usia 21-30 Tahun	2 Orang
2.	Usia 31-40 Tahun	5 Orang
3.	Usia 41-50 Tahun	10 Orang
4.	Usia 51-60 Tahun	2 Orang
Jumlah		19 Orang

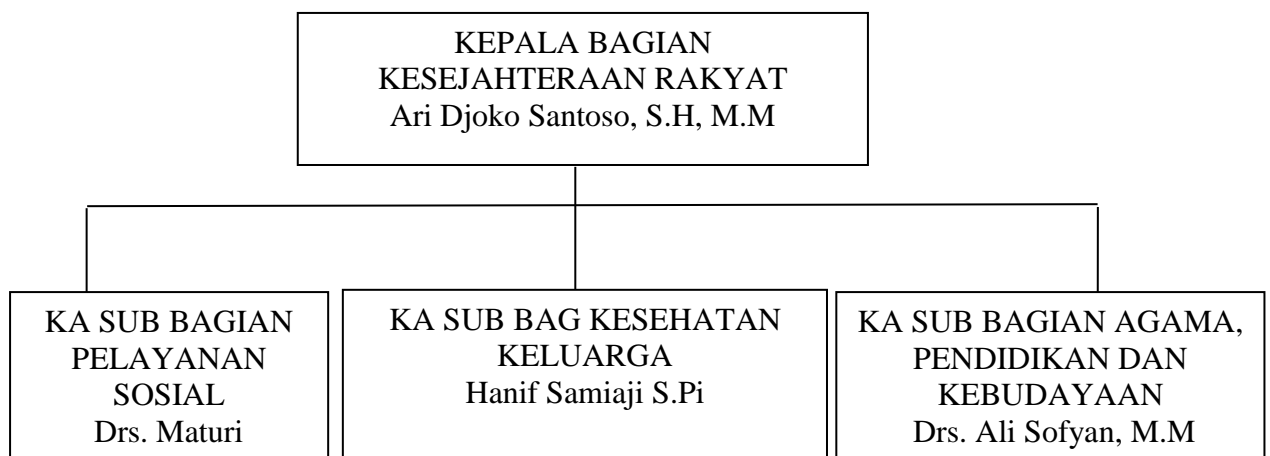
Sumber: Arsip Bagian Kesra Setda Kota Semarang, 2019

Berdasarkan Tabel II.6 menunjukkan usia yang paling muda pada usia 21-30 tahun, yaitu sejumlah 2 (dua) orang, sedangkan usia yang menuju masa pensiun 51-60 tahun sejumlah 2 (dua) orang.

I.5 Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Berikut ini Struktur Organisasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Semarang :

Gambar II.1.



Sumber: Arsip Bagian Kesra Setda Kota Semarang, 2019

